



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Maret 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINI DHARMASTITI
2. Jabatan : KETUA PROGRAM MAGISTER PROGRAM STUDI TEKNIK BIOMEDIS
3. NHK : 962385

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN		Rp.	820.000.000
1.	Tanah dan Bangunan Seluas 132 m ² /54 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
2.	Tanah dan Bangunan Seluas 320 m ² /100 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 320.000.000		
3.	Tanah dan Bangunan Seluas 105 m ² /70 m ² di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN		Rp.	140.000.000
1.	MOBIL, TOYOTA AVANZA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000		
2.	MOTOR, HONDA N1N02Q43L1 A/T Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 30.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA		Rp.	4.500.000
D. SURAT BERHARGA		Rp.	---
E. KAS DAN SETARA KAS		Rp.	120.000.000
F. HARTA LAINNYA		Rp.	---
Sub Total		Rp.	1.084.500.000
III. HUTANG		Rp.	---
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)		Rp.	1.084.500.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkp.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkp.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.